

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sukapura didirikan oleh Sultan Agung yang berasal dari Mataram tepatnya tanggal 9 Muharam tahun alif (26 Juli tahun 1632).¹ Secara etimologis, Sukapura itu berasal dari kata ‘*soeka*’ yang memiliki arti asal serta ‘*poera*’ yang memiliki arti keraton, sedangkan dalam konteks historis, berdirinya Sukapura memiliki fungsi sebagai sebuah tiang penyangga kekuasaan di wilayah Priangan. Sukapura dipimpin oleh seorang bupati. Bupati mempunyai kedudukan yang sama seperti seorang raja dimata para rakyat. Pendapat seperti itu sangat berkaitan erat dengan sebuah konsep yang terdapat dalam tradisi sunda yaitu konsep tentang kekuasaan.²

Pertanian adalah mata pencaharian utama bagi rakyat kabupaten Sukapura sejak zaman dahulu. Sistem pertanian tradisional banyak dilakukan oleh rakyat, karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani baik itu petani pemilik atau penggarap, mereka mulai bercocok tanam dan melakukan pengolahan tanah sebagai sumber kehidupannya. Pertanian padi adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh rakyat Sukapura, sehingga dalam pelaksanaannya mereka mempunyai pengetahuan tentang cara-cara dalam

¹ Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari Masa ke Masa*. Tasikmalaya: Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, 2014, hlm. 30.

² Nina Herlina Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998, hlm. 3.

bercocok tanam dan peralatan yang digunakan dalam pertanian tradisional.³ Sejak masa R.A.A Wiratanoeningrat kabupaten Sukapura sudah berubah nama menjadi kabupaten Tasikmalaya.⁴

Raden Tumenggung Anggadipa merupakan bupati ketiga yang memimpin kabupaten Sukapura mulai dari tahun 1674-1723 dan saat proses pelantikannya sebagai seorang bupati, Raden Tumenggung Anggadipa mendapat penambahan gelar menjadi Raden Tumenggung Wiradadaha III serta mendapat sebutan yaitu *Dalem Sawidak*.⁵ Raden Tumenggung Anggadipa saat memegang jabatan mampu menjalankan birokrasi dengan baik serta keadaan di kabupaten Sukapura saat itu aman terkendali.⁶ Raden Tumenggung Anggadipa tentunya memiliki cara memimpin yang baik, kehidupan rakyat kabupaten Sukapura saat itu sangat diperhatikan penuh.

Raden Tumenggung Anggadipa adalah sosok yang terkenal kuat ilmu agamanya sehingga banyak menyiarkan agama islam di wilayah Sukapura yang membuat kehidupan lebih tentram dan damai, beliau juga terkenal akan kekayaannya, mempunyai pengetahuan yang luas, dan memiliki putra-putri yang banyak. Bupati Raden Tumenggung Anggadipa berhasil mendapatkan sebuah tempat di dalam sanubari para rakyatnya, dimana pada saat itu beliau banyak mendapatkan berbagai penghormatan serta pujian dari rakyat Sukapura. Masa

³ Gayatri Kumala Wardani, *Peralatan Pertanian Padi Tradisional di Kabupaten Magetan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 1-2.

⁴ Miftahul Falah, *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942*. Jawa Barat: Uga Tatar Sunda Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2010, hlm. 1.

⁵ Lasmiyati, *Kopi di Priangan Abad XVIII-XIX*. Balai Pelestarian Nilai Budaya, *Jurnal Patanjala* Vol. 7, No. 2 (2015): 217-232, hlm. 221.

⁶ Emuch Hermansoemantri, *SAJARAH SUKAPURA (Sebuah Telaah Filologis)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1979, hlm. 55-56.

pemerintahannya menjadi sebuah simbol yang menandai semakin berkembangnya kabupaten Sukapura dalam bidang pertanian dan penyiaran agama islam.⁷

Raden Tumenggung Anggadipa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya dimulai dengan membuat sebuah usaha pembangunan dengan cara melakukan tata kelola dalam pemerintahan pada saat itu. Raden Tumenggung Anggadipa membagi 4 kewenangan dalam pengelolaan administrasi agar berjalan dengan lancar yang diserahkan kepada putranya. Patih Yudanagara dipercayakan bertugas dalam urusan keamanan negara serta kesejahteraan masyarakat, lalu yang kedua bertanggung jawab mengenai urusan dalam bidang pertanian serta saluran irigasi dipercayakan kepada putranya yaitu (patih Anggadipa II), lalu yang ketiga mengenai urusan administrasi negara dipercayakan kepada putranya yaitu (patih Raden Somanagara), serta yang keempat mengenai urusan penghasilan dan juga keuangan negara dipercayakan kepada putranya yaitu (patih Raden Indrataruna).

Patih yang mendapat kewenangan pada saat itu tetap menjalankan tugasnya dibawah kepemimpinan dan pengawasan dari bupati Raden Anggadipa. Pemerintahan berjalan dengan maksimal karena sudah dilakukan pembagian tugas, sehingga terciptanya kesejahteraan hidup rakyat kabupaten Sukapura yang memang pada saat itu kehidupannya masih sangat bergantung pada bidang pertanian.⁸ Bukti yang menunjukkan mengenai prestasi dari Raden Tumenggung

⁷ Muhajir Salam, "Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)," *HISTORIA, Soekapoera Institute* Vol. 2, No. 1 (2015): 106-201, hlm. 111.

⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

Anggadipa terhadap rakyat kabupaten Sukapura pada masa itu terlihat dalam pesawahan/ tani serta saluran irigasi yang sudah mulai berkembang dan kini hal tersebut masih bisa dirasakan manfaatnya.⁹ Pembangunan yang dilakukan dalam pembuatan saluran irigasi serta areal pesawahan terdapat di daerah Leuwibudah, Koleberes, Sukaraja, Cibaganjing, Mangunreja, serta Ciramajaya. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh beliau ini sampai ke daerah Pameungpeuk (kab. Garut).

Rakyat Sukapura yang saat itu hidupnya masih sangat bergantung pada bidang pertanian memang sesuai dengan mata pencaharian para penduduk zaman dulu yang pada awalnya yaitu *ngahuma* atau dengan kata lain berladang, barulah setelah itu dinamakan bersawah, bahkan sejak zaman tradisional khususnya zaman kerajaan sunda mata pencaharian itu dinamakan peladang.¹⁰ Rakyat saat itu memang hidup dari hasil pertanian, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya sebagian kecil rakyat zaman dulu ada yang sudah mulai berdagang.¹¹ Rakyat di kabupaten Sukapura sebelum dikuasai oleh penjajah tahun 1677 kehidupannya itu masih dalam lingkungan yang tradisional, bebas, dan rakyat Sukapura hidup dengan makmur yang dibalut dengan budaya ekonomi saat itu yang masih bersahaja dikarenakan kekayaan alam yang melimpah mampu mencukupi kebutuhan hidup para rakyat.

⁹ Lasmiyati, *Kopi di Priangan Abad XVIII-XIX*. Balai Pelestarian Nilai Budaya, *Jurnal Patanjala* Vol. 7, No. 2 (2015): 217-232, hlm. 221.

¹⁰ Sobana Hardjasaputra, *Priangan Abad ke 17-19*. Bandung: PT Galuh Nurani, 2014, hlm. 30-31.

¹¹ Sulasman, *Islamisasi di Tatar Sunda (Era Kerajaan Sukapura)*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2017, hlm. 168.

Pertanian yang merupakan pusat dari perekonomian yang sangat utama, dimana padi adalah makanan pokok masyarakat yang dihasilkan dari sebuah *huma* yang ditanam di pedalaman hutan dan dilakukan secara nomaden. Rakyat kabupaten Sukapura saat itu tidak menyukai penanaman padi yang dilakukan di sawah (tanah yang basah), karena rakyat zaman dulu, padi gunung rasanya lebih enak, memiliki kandungan gizi yang besar dan juga lezat.¹² Rakyat Sukapura akhirnya membudidayakan padi huma pada saat itu, sehingga petani tidak merasa repot mengenai saluran air dan tenaga yang dikeluarkan dalam pengolahan tanahnya juga tidak terlalu terkuras, akan berbeda pula halnya apabila penanaman padi yang dilakukan di sawah karena memerlukan saluran air yang cukup. Padi yang ditanam biasanya akan mudah mengalami kegagalan panen apabila sedang musim *paceklik*.¹³

Peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul “Perkembangan Pertanian Pada Masa Pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di Kabupaten Sukapura Tahun 1674-1723”, karena bidang pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membangun kesejahteraan hidup rakyat dan meningkatkan perekonomian. Pertanian juga berfungsi sebagai penyedia bahan pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari rakyat, mengingat pertanian zaman dulu masih menggunakan cara-cara dan alat tradisional, akan tetapi pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa, pertanian di kabupaten Sukapura mulai mengalami perkembangan dan meluas di beberapa

¹² Muhajir Salam, “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)”, *HISTORIA, Soekapoera Institute* Vol. 2, No. 1 (2015): 106-201, hlm. 110.

¹³ Dasum Muanas, dkk, *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998, hlm. 23.

daerah, hal tersebut adalah sebuah simbol menandai semakin berkembangnya kabupaten Sukapura dalam bidang pertanian yang manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini.

Peneliti juga ingin mengkaji lebih dalam mengenai Sukapura, karena peneliti menyadari bahwasanya judul yang diangkat belum banyak yang meneliti khususnya mengenai Raden Tumenggung Anggadipa, sehingga dalam pencarian informasinya juga masih minim dan masyarakat banyak yang kesulitan untuk mengakses informasi mengenai sosok Raden Tumenggung Anggadipa. Hal yang lainnya dikarenakan peneliti lahir dan tumbuh di Tasikmalaya, maka sudah seharusnya peneliti memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sejarah lokal agar bisa memberikan nilai edukatif serta inspiratif, baik kepada masyarakat maupun generasi selanjutnya agar mereka tidak buta akan sejarah lokalnya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perkembangan pertanian pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di kabupaten Sukapura tahun 1674-1723?”. Rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Raden Tumenggung Anggadipa?
2. Bagaimana perkembangan pertanian di kabupaten Sukapura pada tahun 1674-1723?
3. Bagaimana dampak dari perkembangan pertanian terhadap rakyat kabupaten Sukapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Perkembangan Pertanian Pada Masa Pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di Kabupaten Sukapura Tahun 1674-1723” yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan profil Raden Tumenggung Anggadipa.
2. Mendeskripsikan perkembangan pertanian di kabupaten Sukapura pada tahun 1674-1723.
3. Mendeskripsikan dampak dari perkembangan pertanian terhadap rakyat kabupaten Sukapura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan bisa memberikan kegunaan baik secara teoretis, praktis, maupun empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, peneliti berharap agar penelitian ini bisa dikembangkan dan digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran khususnya mengenai sejarah lokal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi muatan lokal yang digunakan oleh masyarakat sekitar maupun dalam pembelajaran.

3. Kegunaan Empiris

Secara empiris, peneliti berharap agar hasil penelitian ini menjadi sebuah bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai sumber koleksi di perpustakaan Tasikmalaya.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

1.5.1.1 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah seni yang dapat mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia melakukan kerja sama yang sudah didasarkan terhadap kemampuan orang itu agar bisa membimbing yang lain dalam mencapai cita-cita maupun tujuan yang ingin diwujudkan oleh kelompoknya.¹⁴ Menurut Miftah Thoha definisi kepemimpinan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk bisa mempengaruhi perilaku individu yang lain, atau dengan kata lain sebuah seni yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik itu bagi kelompok ataupun perseorangan.¹⁵

Menurut pendapat dari Hadari, kepemimpinan apabila dipandang dari aspek struktural adalah sebuah proses yang memberikan sebuah motivasi agar orang lain yang dipimpinnya akan melaksanakan pekerjaan serta kegiatan yang sesuai dengan program awal yang sudah ditetapkan bersama, sedangkan dari aspek non-struktural, kepemimpinan berarti suatu proses yang dapat memberikan pengaruh pada perasaan, pikiran, serta tingkah laku yang mengerahkan seluruh fasilitas agar

¹⁴ Wendy Sepmady Hutahean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021, hlm. 1.

¹⁵ Syamsu Q, Badu, Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017, hlm. 32.

tercapai tujuan bersama.¹⁶ Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat di atas mengenai definisi kepemimpinan yaitu suatu upaya yang dapat mempengaruhi individu lain dengan cara memberikan bimbingan dan melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

1. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang dari awalnya sudah berakar terhadap struktur sosial yang memang tersusun sesuai dengan kelahiran, status, serta kekayaan. Seorang bupati harus memiliki ketiga unsur kepemimpinan tradisional tersebut dalam dirinya.¹⁷ Unsur kelahiran, biasanya hak waris jabatan itu didapatkan secara turun-temurun yang sudah menjadi sebuah tradisi, sedangkan dalam hal unsur status serta kekayaan yang dimiliki oleh seorang bupati itu dikarenakan fungsinya. Kepemimpinan juga berkaitan dengan tiga hal penting lainnya seperti kekuasaan, kemampuan serta kewibawaan.¹⁸

Menurut pendapat dari H. Witdarmono, kepemimpinan tradisional adalah sebuah kepemimpinan yang lebih mengutamakan apa yang sudah ada kemudian diwariskan secara terus-menerus kepada keturunan mereka selanjutnya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan tradisional itu adalah kepemimpinan yang terjadi secara turun-temurun atau diwariskan dalam kelompok sosial. Seorang pemimpin tradisional itu lahir karena diminta oleh para rakyat berdasar pada prestasi spiritual serta amal baktinya terhadap rakyat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sobana Hardjasaputra, *Priangan Abad ke 17-19*. Bandung: PT Galuh Nurani, 2014, hlm. 11.

¹⁸ Sarjana Sigit Wahyu, *Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam dalam Masyarakat Jawa*. *Jurnal Sabda* Vol. 6, No. 1 (2011): 23-29, hlm. 24.

Peranan serta kedudukan dari seorang bupati yakni sebagai kepala daerah menyatu juga menjadi pemimpin tradisional yang mana hal itu tidak bisa digantikan oleh orang-orang yang berasal dari kolonial. Bupati sebagai pemimpin tradisional saat itu harus mampu memberikan perlindungan, pengawasan, serta mengatur kehidupan para masyarakatnya, karena jumlah dari rakyat pribumi yang terdapat di kabupaten masih sedikit, sehingga pola kepemimpinannya juga masih tunggal yang mencakup seluruh bidang kehidupan para penduduknya, hal tersebut merupakan pola kepemimpinan pada saat itu.¹⁹

2. Gaya Kepemimpinan

Menurut pendapat dari Flippo yang menyatakan bahwasanya gaya kepemimpinan bisa diartikan suatu pola dari tingkah laku yang sudah dirancang untuk merealisasikan antara tujuan dari sebuah organisasi dengan tujuan dari masing-masing orang agar tercapainya sebuah tujuan bersama.²⁰ Menurut Nawawi, gaya kepemimpinan merupakan sebuah perilaku maupun cara yang dipilih serta digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, perasaan, serta perilaku organisasi.²¹

Kesimpulan dari definisi gaya kepemimpinan berdasarkan pendapat-pendapat di atas adalah suatu pola perilaku ataupun cara yang dipilih serta digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi serta memimpin para bawahannya. Gaya kepemimpinan setiap orang itu berbeda, maka dari itu seorang pemimpin harus selalu melatih serta mengasah dirinya supaya memiliki

¹⁹ Sobana Hardjasaputra, *op.cit.*, hlm. 12.

²⁰ Syamsu Q, Badu, Novianty Djafri, *op.cit.*, hlm. 33.

²¹ Ernie Trisnawati Sule, dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Membangun Organisasi Unggul di Era Perubahan)*. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 21.

kemampuan dalam mengembangkan organisasinya menjadi sebuah lingkungan organisasi yang baik.²²

Gaya bersikap dan bertindak seorang pemimpin akan nampak pada saat beliau sedang bekerja, seperti saat berkomunikasi, cara memberi sebuah perintah dan juga tugas, cara memecahkan persoalan, serta cara dalam membuat sebuah keputusan. Oleh sebab itu, dengan adanya gaya maka seorang pemimpin bisa dikatakan memiliki kekuasaan, kemampuan, dan kewibawaan karena telah memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin membuatnya bisa bekerjasama dengan baik agar bisa mencapai tujuan dan harapan dari bawahannya. Seorang pemimpin yang efektif harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang sedang terjadi agar bisa mengambil keputusan yang tepat.

Karakteristik seorang pemimpin, karakteristik para pengikut dan karakteristik situasi merupakan kunci utama yang harus dipahami untuk efektivitas kepemimpinan. Indikator gaya kepemimpinan diantaranya yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan dalam mengendalikan para bawahan, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan dirinya sendiri.²³

3. Teori Pemimpin terhadap Kepemimpinan

Ada beberapa teori dasar mengenai pemimpin terhadap kepemimpinan diantaranya yaitu teori genetis atau keturunan, teori sosial, dan teori ekologis.

²² Syamsu, Djafri, *Loc.cit.*

²³ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 43.

Teori dasar yang akan diterapkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah teori genetis atau keturunan.

a. Teori Genetis / Keturunan

Teori pertama ini menjelaskan mengenai pemimpin besar atau *great leader* yang pada dasarnya dilahirkan dan tidak dibuat.²⁴ Menurut pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan teori genetis adalah teori yang di dalamnya menjelaskan bahwa eksistensi dari seorang pemimpin bisa dilihat serta dinilai dari sifat yang sudah dibawanya sejak lahir sebagai sesuatu yang memang sudah diwariskan. Para penganut teori ini menyatakan bahwasanya pemimpin ini terbentuk sendiri, dikarenakan ia memang sudah dilahirkan dengan adanya bakat dalam memimpin apapun situasinya, karena ia dilahirkan memang untuk hal tersebut. Dengan kata lain, takdir memang sudah menetapkannya untuk menjadi seorang pemimpin.

Teori ini juga memberikan sebuah sudut pandang yang kurang pantas karena apabila ada seseorang yang tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka ia tidak berkesempatan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini Raden Tumenggung Anggadipa termasuk dalam kategori teori ini, karena Raden Tumenggung Anggadipa merupakan keturunan dari seorang pemimpin, bahkan ayahnya yaitu Raden Wirawangsa dulunya adalah bupati pertama yang memimpin Sukapura. Maka dari itu, Raden Tumenggung Anggadipa sebagai keturunannya dapat mewarisi jabatan menjadi seorang pemimpin juga.

²⁴ Danim Sudarwan, *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 7.

1.5.1.2 Teori Sistem Pertanian

Pertanian merupakan suatu jenis proses produksi yang berdasarkan pada tahap perkembangan tumbuhan maupun hewan. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh manusia bertujuan agar menghasilkan pangan, sumber energi, serta bahan dengan cara tanam-menanam. Kegiatan pertanian selalu melibatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan budidaya. Pertanian adalah sebuah komponen fundamental yang mana istilah dari “petani” selalu mengacu terhadap seseorang yang melakukan sebuah kegiatan pertanian misalnya petani padi.²⁵

Ilmu pertanian terbagi menjadi dua kategori yakni berdasarkan arti luas serta arti sempit. Pertanian adalah seluruh tindakan yang di dalamnya melibatkan penggunaan dari makhluk hidup, seperti hewan dan tanaman untuk kebutuhan manusia (arti luas), sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai usaha kegiatan yang membudidayakan tanaman-tanaman musiman. Kegiatan pertanian yang dilakukan rakyat biasanya akan menghasilkan bahan makanan pokok (beras, palawija serta tanaman hortikultura yaitu buah dan juga sayur).

Menurut pendapat dari Subejo, pertanian merupakan sumber pangan yang paling utama untuk rakyat. Lahan pertanian digunakan untuk melakukan penanaman jenis-jenis makanan pokok rakyat. Pertumbuhan populasi yang terus mengalami peningkatan pada akhirnya mendorong manusia untuk melakukan pengolahan, pemeliharaan, dan memanen makanan mulai dari cara yang sederhana. Pertanian adalah bidang yang berperan penting dalam menyediakan

²⁵ Resti, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022, hlm. 33.

pangan, meningkatkan perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan perkembangan sosial-budaya sehingga bidang pertanian ini menjadi salah satu pondasi yang utama untuk menopang peradaban manusia.

Kegiatan pertanian banyak ditekuni oleh para petani dan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan agraris.²⁶ Jenis-jenis pertanian terdiri dari sawah, ladang, dan perkebunan. Sawah adalah jenis pertanian yang dilakukan di lahan yang basah serta banyak menggunakan pengairan, sawah memiliki berbagai macam jenis, ada sawah bencah, sawah irigasi, sawah tadah, dan sawah lebak, sedangkan perkebunan adalah sebuah lahan yang sudah ditanami dengan berbagai tanaman perkebunan. Ladang merupakan pertanian lahan kering dengan melakukan penebangan hutan terlebih dahulu.

1. Sistem Pertanian Tradisional

Kehidupan bertani dilingkungan masyarakat Jawa saat itu masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Menurut pendapat Tohir yang menyatakan bahwasanya pertanian merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam bidang bercocok tanam, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan serta pengelolaan hasil bumi dan pemasarannya.²⁷ Dalam pertanian tradisional biasanya kegiatan yang dilakukan oleh rakyat adalah bercocok tanam, berkebun dan beternak yang dalam pelaksanaannya menggunakan peralatan yang masih tradisional dan

²⁶ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 1.

²⁷ Beny Septyliyan Primada, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah (Desa Tamu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal JESTT* Vol. 2, No. 11 (2015): 954-969, hlm. 957.

sesekali menggunakan hewan sebagai tenaga bantuan dan mereka memiliki sistem kepercayaan. Pada zaman dulu pelaksanaan pertanian sangat bergantung pada peranan sumber daya manusia dimana rakyat adalah tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Sistem pertanian di dalamnya terdiri dari beberapa jenis pertanian yaitu ada pertanian basah dan ada juga pertanian kering.

Jenis pertanian basah biasanya pertanian yang padinya di sawah yang mengutamakan adanya pengairan atau istilah lain *wet rice field*, sedangkan untuk pertanian kering biasanya lebih pada pertanian yang dilakukan di daerah yang terbuka atau bisa disebut juga pertanian gaga/tegal (*dry field cultivation*).²⁸ Istilah anak thani ini ntuk pertama kalinya ditemukan pada prasasti Airkali tahun 927 M.

Istilah anak *thani* itu memiliki arti yang sama dengan anak *wanua* (sebutan bagi para penduduk desa), sedangkan kata “*thani*” biasanya digunakan untuk menyebut desa ataupun tanah. Adanya campur tangan dari seorang raja/bupati dalam sektor pertanian biasanya selalu ditujukan dalam sebuah pembangunan untuk sistem irigasi, misalnya dalam pembuatan bendungan yang akan dipakai untuk irigasi. Dalam bidang pertanian, ada jenis pertanian tegalan. Jenis pertanian seperti ini biasanya di tanah kering karena lebih mengutamakan cara bertani yang dilakukan di tegalan.

Pertanian yang dilakukan di tegalan, biasanya harus dilakukan pengolahan tanahnya terlebih dulu sebelum akan ditanami. Ada berbagai jenis tanaman yang bisa ditanam di tegalan dan lebih bervariasi, contohnya kacang, ubi jalar, jagung

²⁸ Ph Subroto, *Sistem Pertanian Tradisional Jawa Tinjauan Secara Arkeologis dan Etnografis*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Javanologi, 1985, hlm. 3-4.

dan lainnya. Jenis tanaman seperti itu bisa tumbuh tanpa adanya sebuah pengairan. Jadi untuk kebutuhan airnya, biasanya hanya mengandalkan air hujan saja. Selain itu, ada juga jenis tanaman lain yang bisa ditanam di tegalan yaitu padi gogo (jenis padi yang bisa tumbuh di tanah tegalan).²⁹

1.5.1.3 Teori Dinamika Sosial

Dinamika sosial terjadi sebagai sebuah akibat dari adanya interaksi diantara manusia serta kelompok, sehingga nantinya diantara mereka terjadi suatu proses yang saling mempengaruhi serta menyebabkan terjadinya sebuah dinamika. Dinamika sosial biasanya terjadi pada sebuah masyarakat yang berupa adanya perubahan dalam nilai sosial, norma dalam masyarakat serta pola perilaku dan susunan lembaga dalam masyarakat, wewenang dan juga kekuasaan.

Menurut pendapat dari Slamet Sentosa, dinamika sosial merupakan sebuah bentuk hubungan yang telah terjalin diantara kelompok sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat dan terjadi secara teratur serta berkaitan dengan psikologis yang jelas (hubungan yang terjalin dalam kelompok sosial tersebut mendalam), sehingga mereka bisa merasakan situasi yang sedang dialami secara bersama-sama. Jadi, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut bisa meliputi perubahan status, organisasai sosial, lembaga serta struktur sosial dalam masyarakat.³⁰ Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat biasanya berkaitan dengan norma sosial, pola perilaku, nilai sosial, lembaga masyarakat, kepemimpinan, kekuasaan, dan organisasi dalam masyarakat.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 17-29.

³⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 3.

³¹ Silvia Tabah Hati, *Perubahan Sosial Budaya*. Medan: Universitas Islam Negeri, hlm. 24.

Ada beberapa jenis teori yang berkaitan dengan dinamika sosial, diantaranya yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme.

1. Teori Evolusi Sosial

Proses terjadinya evolusi sosial biasanya dimulai dari sebuah individu yang menggabungkan diri menjadi sebuah keluarga, kemudian keluarga akan menggabungkan diri menjadi sebuah komunitas, sebuah komunitas akan berubah menjadi sebuah masyarakat.³² Evolusi sosial merupakan serangkaian perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama yang dimulai dari sebuah kelompok suku atau masyarakat yang hidupnya masih sangat sederhana serta homogen, lalu lambat laun secara bertahap mereka akan menjadi sebuah kelompok masyarakat yang kompleks. Dengan kata lain, perkembangan sebuah masyarakat dan kebudayaan yang terjadi pada tiap bangsa yang ada di dunia akan selalu melalui tahapan-tahapan evolusi yang sama, meskipun untuk variasi-variasi yang terjadi bisa saja berbeda.³³

Menurut seorang sosiologi yang berasal dari Inggris, yaitu Herbert Spencer yang mengemukakan tentang teori evolusi sosial, menyatakan bahwasanya suatu masyarakat merupakan sebuah organisme, suku primitif biasanya mengalami perkembangan melalui peningkatan jumlah anggotanya. Perkembangan tersebut bisa terjadi seperti pengulangan atau terbentuknya suatu proses yang lebih luas dalam penyatuan beberapa kelompok. Dalam urusan pertumbuhan masyarakat

³² Ahmad Musonnif, "Keberagaman Sistem Kalender Umat Islam Perspektif Teori Diferensiasi Sosial Herbert Spencer". *Jurnal Ahkam* Vol. 2, No. 1 (2014): 4-19, hlm. 5.

³³ Etmi Hardi, *Sejarah Teori Antropologi*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2003, hlm. 5.

dapat menyebabkan terjadinya perbanyakan, penyatuan kelompok, terjadinya kepadatan penduduk yang meningkatkan solidaritas serta keakraban.³⁴

Tahap-tahap masyarakat yang belum beradab dan sifatnya homogen, biasanya dikarenakan mereka ini terdiri atas kumpulan manusia yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Biasanya suku-suku nomaden yang memiliki ikatan, mereka ini disatukan oleh sebuah ketundukan pada pemimpinnya. Ikatan tersebutlah yang mengikat hingga akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang beradab, sedangkan untuk kepemimpinan biasanya muncul sebagai suatu konsekuensi munculnya sebuah keluarga yang bersifat nomaden atau tidak tetap.

Kekuasaan dan kewenangan biasanya ditentukan oleh sebuah kekuatan dan kecerdikan seseorang yang kemudian kekuasaan itu diwariskan pada keturunannya, serta terjadinya peningkatan kapasitas adalah tanda proses pertumbuhan suatu masyarakat. Organisasi sosial yang awalnya masih samar, pertumbuhannya mulai berubah secara perlahan, kemudian adat menjadi sebuah hukum. Berbagai hal yang terjadi dan memenuhi sebuah evolusi menunjukkan terjadinya kemajuan menuju ikatan, keanekaragaman dan kepastian. Perkembangan juga muncul dalam sistem pemerintahan seperti tumbuhnya kelas sosial dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sebuah pembagian kerja.

Perkembangan sebuah masyarakat dari tipe homogen menuju pada heterogen atau masyarakat primitif menuju pada masyarakat modern. Evolusi sosial terjadi melalui tahapan diferensiasi struktur dan fungsional yaitu dari sederhana menuju

³⁴ Dewan Mahboob Hossain, Sohela Musari, "A Critical Analysis of Herbert Spencer's Theory of Evolution", *Lumen Publishing House* Vol. 3, No. 2 (2012): 55-66, hlm. 58.

kompleks, dari semula tanpa bentuk menuju pada bentuk yang bisa dilihat dan berkaitan pada bagian-bagian, dari ketidakstabilan menuju kestabilan. Selain itu, terjadinya proses evolusi sosial melalui tahapan-tahapan perkembangan yaitu tahap masyarakat masih sederhana (masyarakat masih terisolir, aktivitasnya serupa, dan tidak adanya organisasi), tahap masyarakat kompleks (ada pembagian kerja, pembagian fungsi antara masyarakat, mulai adanya hierarki politik), tahap masyarakat yang lebih kompleks (adanya wilayah dan mempunyai konstitusi serta hukum), tahap peradaban (tebentuknya negara bangsa).³⁵

2. Teori Fungsionalisme

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dan menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Adanya interaksi tersebut membuat hubungan diantara manusia terjalin dengan baik. Interaksi sosial terjadi mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia membutuhkan adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya. Khususnya dalam lingkungan masyarakat, biasanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, seseorang atau kelompok membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Berjalannya sebuah lingkungan tidak lepas dari fungsi serta peran dari tiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya, karena tiap individu tersebut mempunyai tugasnya masing-masing dalam lingkungan masyarakat yang mana setiap tugasnya harus disesuaikan dengan fungsi dari tiap rakyatnya.³⁶

³⁵ Komanto Sunanto, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 40-42.

³⁶ Aris, "Pengertian Teori Struktural Fungsional Menurut Beberapa Ahli", Gramedia Blog, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/>

Pada umumnya setiap manusia pasti akan menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya dalam lingkungan masyarakat, agar hubungan tersebut bisa terjalin dengan baik antar masyarakat, maka diperlukan adanya fungsi dan peran bagi masing-masing orang. Adanya peran dari tiap individu dalam lingkungan tersebut nantinya akan memunculkan berbagai tugas yang harus diselesaikan sebaik mungkin, karena berbagai tugas yang dimiliki oleh tiap manusia pada umumnya telah diatur dalam suatu aturan yang telah disepakati oleh semua anggota masyarakat yang ada dalam lingkungan tersebut, apabila tugas tersebut tidak diselesaikan maka akan menimbulkan suasana lingkungan masyarakat yang tidak harmonis. Oleh sebab itu, adanya pembagian kerja atau tugas yang diberikan pada tiap individu akan disesuaikan dengan fungsi dari tiap individu tersebut dalam lingkungan masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan masyarakat yaitu fungsi dari tiap individu yang diperlukan serta struktur sosial. Struktur sosial yang baik akan mampu menciptakan kehidupan dilingkungan masyarakat menjadi teratur dan harmonis. Menurut seorang ahli sosiolog yang bernama Emile Durkheim, pencapaian dalam kehidupan sosial dan keteraturan sosial dalam masyarakat biasanya disebut solidaritas sosial yang berkaitan dengan fakta sosial. Fakta sosial diibaratkan sebagai sebuah kekuatan dan terstruktur yang sifatnya eksternal serta memaksa. Fakta sosial tersebut yang nantinya mempengaruhi tiap

pikiran, perasaan, serta tindakan dari tiap individu. Apa yang biasa dipikirkan merupakan adat-istiadat, kebiasaan serta cara hidup manusia.³⁷

Permasalahan yang biasanya terjadi dalam solidaritas sosial adalah keturunan (perbedaan antara generasi yang satu dengan yang lain). Solidaritas sosial dalam masyarakat tradisional sifatnya masih sangat sederhana, dengan kata lain peran yang dimiliki oleh tiap individu dalam masyarakat tidak banyak. Masyarakat tradisional saat itu belum ingin melihat dunia yang lebih luas karena kehidupan yang dijalani hanyalah melakukan tugas-tugas yang memang telah ditetapkan dalam aturan masyarakat, misalnya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu, solidaritas dalam kehidupan masyarakat tradisional mudah untuk bisa diwujudkan. Hal-hal tersebut nampak dalam pembagian kerja di lingkungan masyarakat.³⁸

1.5.2 Kajian Pustaka

Ada beberapa buku dan artikel jurnal yang digunakan oleh peneliti untuk membahas mengenai sejarah Sukapura beserta bupatinya, salah satunya yaitu Raden Tumenggung Anggadipa. Ada juga beberapa buku lain yang digunakan untuk membahas terkait perkembangan pertanian dan sejarah penyerahan wilayah Priangan. Buku Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan judul “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari Masa ke Masa”, buku karya Jan Breman tahun 2014 yang berjudul “Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870)”, ada disertasi

³⁷ Arifuddin M Arif, “*Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*”. *Moderasi, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 1, No. 2 (2020): 1-14, hlm. 5.

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

karya Emuch Hermansoemantri tahun 1979 dengan judul “Sajarah Sukapura: Sebuah Telaah Filologis”, artikel karya Muhajir Salam tahun 2015 yang berjudul “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)”, dan yang terakhir adalah buku yang berjudul “Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium” karya dari Sartono Kartodirdjo.

Pertama, buku Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan judul “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari Masa ke Masa” yang diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014. Buku tersebut di dalamnya berisi pembahasan tentang sejarah Tasikmalaya yang dibagi menjadi 10 subab, bagian pertama menjelaskan tentang sejarah pada masa Galunggung, bagian kedua tentang masa Sukapura, pembahasannya diawali pada saat Sukakarta menjadi bawahan dari kerajaan Sunda, terjadinya ekspansi Mataram ke wilayah Priangan, lalu sejarah terbentuknya kabupaten Sukapura sampai dengan sejarah pembangunan Mesjid Agung Manonjaya.

Pembahasan ketiga dalam buku ini tentang perpindahan ibu kota Sukapura ke daerah Tasikmalaya, sampai pada bagian keenam dibahas tentang perekonomian yang terjadi di Tasikmalaya pada era kolonial, diantaranya usaha pembangunan ekonomi di kabupaten Sukapura tahun 1674 yang mulai digarap dengan serius oleh Raden Tumenggung Anggadipa sebagai bupati ketiga Sukapura yang memerintah dari tahun 1674-1723. Bupati ini sering disebut *Dalem Sawidak* dikalangan rakyat, ia merupakan simbol yang menandai semakin berkembangnya bidang pertanian di kabupaten Sukapura. Mulai tahun 1680-an terjadi penerapan sistem monopoli di wilayah Sukapura, sistem ini sama dengan

sistem “*nengah*” yang terdapat dalam tradisi petani sunda tentang budidaya padi. *Kompeni* mengeksploitasi hasil hutan Sukapura yaitu kayu pada awal penerapan sistem monopoli ini. Pembahasan akhir dalam buku tersebut mengenai bupati-bupati Tasikmalaya yang memerintah pada masa orde baru.

Buku yang kedua adalah buku karya Jan Breman yang berjudul “Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870)” yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pembahasan diawali dengan menjelaskan dominasi Mataram yang terus meningkat dalam menaklukkan para penguasa. Kekuasaan Mataram yang semakin meningkat bersamaan dengan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh rakyat, karena adanya perintah pada saat itu maka para petani harus membuka lahan liar di berbagai lokasi yang menyebar. Perintah penanaman itu adalah salah satu cara kolonisasi yang berguna untuk mencegah kerajaan Banten menyebarkan pengaruh ke dataran tinggi sunda. VOC kemudian muncul sebagai penguasa yang baru, tahun 1706 VOC memberi tugas pada pangeran Aria Cirebon untuk melakukan pengawasan terhadap rakyat dan tanah Priangan.

Kekuasaan raja di Priangan pada saat itu berkaitan dengan sistem pertanian yang dilakukan penduduk atau petani dan berhubungan dengan para petinggi kolonial. Buku tersebut membahas juga tentang pembukaan lahan di Priangan, pembukaan sawah, kehidupan rumah tangga para petani, bupati, kedudukan dari kepala penduduk yang lebih tinggi maupun rendah, serta menjelaskan hubungan antara petinggi dengan para petani pada masa itu. Pemberlakuan tanam paksa yang meliputi cara produksi, perdagangan bebas yang dilakukan, penyeteran

wajib sampai budidaya kopi dibahas dalam buku tersebut, bahkan pembahasan mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan di wilayah Priangan dijelaskan secara detail.

Ketiga, sebuah disertasi yang dibuat oleh Emuch Hermansoemantri tahun 1979 dengan judul “Sajarah Sukapura: Sebuah Telaah Filologis”, pembahasan diawali dengan menceritakan seorang bangsawan yang berasal dari Jawa yang namanya adalah Pangeran Ngabehi Kusumah Hadiningrat yang saat itu pergi untuk berkelana ke Pasundan, kemudian dihubungkan dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Dipati Ukur kepada Mataram. Para keturunan dari saropon Cibuniagung diantaranya yakni Dalem Wiraha yang tinggal di daerah Dayohtengah, lalu ada Sukakarta yang mempunyai seorang Kanjeng Dalem Wirawangsa yang selanjutnya memangku jabatan sebagai bupati yang pertama di kabupaten Sukapura, setelah itu dijelaskan mengenai peperangan antara Dipati Ukur melawan serdadu para *kompeni*.

Pada pembahasan selanjutnya mengenai Sukapura, disebutkan bahwasanya bupati pertama yaitu Raden Wirawangsa yang mempunyai 28 orang putra. Jabatan seorang bupati diwariskan kepada putranya yang bernama *Dalem Tambela*, akan tetapi ia tidak sempat memimpin lama karena meninggal dunia, kemudian jabatan bupati itu diturunkan pada adiknya yaitu Raden Anggadipa. Raden Anggadipa biasa disebut dengan *Dalem Sawidak*, hal itu dikarenakan beliau mempunyai putra yang banyak jumlahnya lebih dari 60. Pembahasan yang terakhir dalam disertasi ini adalah mengenai Raden Danukusumah.

Keempat, artikel jurnal karya Muhajir Salam tahun 2015 yang diterbitkan oleh Soekapoera Institute Vol. 2, No. 1 yang berjudul “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)”, dalam artikel tersebut membahas tentang perekonomian yang terjadi di Sukapura sebelum masuknya kolonial. Pertanian yang menjadi jantung ekonomi utama, padi adalah makanan pokok masyarakatnya. Pada zaman dulu sebagian besar tanah yang ada di Sukapura merupakan tanah liar yang tidak dikuasai, lalu berkembangnya kepemilikan tanah terjadi bersamaan pada saat meluasnya pertanian padi tegalan. Kehidupan ekonomi yang terjadi di kabupaten Sukapura dipengaruhi oleh sistem sosial dalam masyarakat.

Usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan di Sukapura pada tahun 1674 dimulai dengan melakukan tata kelola dalam pemerintahan, lalu masuk 1677 terjadinya sistem monopoli dan kedatangan *kompeni* di Sukapura. Komoditas unggulan yang diterapkan dalam sistem monopoli tersebut yaitu kayu, kapas, benang, tarum, indigo, serta lada. Pembahasan selanjutnya dalam artikel tersebut adalah sistem eksploitasi ekonomi politik di Sukapura tahun 1800-1830 yang lebih buruk daripada *kompeni* karena adanya kebijakan politik baru era Daendels yang berlanjut pada sistem tanam paksa dan tumbuhnya perkebunan pada tahun 1830 sampai 1870, sedangkan dari tahun 1870-1942 kabupaten Sukapura mulai memasuki era liberal kolonial Belanda yang ditandai dengan munculnya UU Agraria pada tahun 1870.

Buku yang kelima adalah buku yang berjudul “Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium” karya dari Sartono

Kartodirdjo yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1987, pembahasan dalam buku ini khususnya bab 3 menjelaskan awal kedatangan pihak *kompeni* yang melakukan kegiatan perdagangan serta menjelaskan terkait politik dagang yang dilakukannya. Kemudian pembahasannya berlanjut pada sejarah Kerajaan Mataram pada abad ke-17 yang meliputi perebutan hegemoni, kegiatan politik yang dijalankan Mataram, proses terjadinya konfrontasi antara Kerajaan Mataram dengan dan kompeni, terjadinya pemberontakan di Sumedang serta Ukur sampai penjelasan terkait wilayah Priangan sebelum dan saat dominasi Mataram, yang mana pengaruh dari Mataram itu masuk wilayah Priangan melalui sungai Cimanuk serta Citandui yang kemudian hegemoni tersebut berakhir tahun 1677 pada saat wilayah Priangan sampai daerah sungai Pamanukan diserahkan pada tanggal 19-20 Oktober tahun 1677 kepada pihak *kompeni*.

Pada masa itu Kerajaan Mataram melakukan pendirian pemukiman baru serta dilakukan juga organisasi pemerintahan dan pendistribusian para penduduk diantara daerah-daerah tersebut, diantaranya didirikan 4 kabupaten yaitu Sumedang, Parakanmuncang, Bandung serta Sukapura, sedangkan untuk hierarki pemerintahannya dimulai dari urutan tumenggung, patih atau wedana serta mantri. Untuk pendirian wilayah kabupaten Sukapura dilakukan tahun 1641 yang ibu kotanya terletak di tepi sungai Ciwulan yang nantinya akan berkembang menjadi kota yang diberi nama Sukaraja. Pembahasan dalam bab 5 menjelaskan bahwa pada tahun 1677 wilayah Priangan sudah diperoleh oleh *kompeni* dari Kerajaan Mataram, lalu pada tahun 1705 wilayah tersebut menjadi daerah langsung yang ada di bawah kekuasaan *kompeni*. Tujuan utama pihak VOC saat

itu bukan untuk melakukan pemerintahan secara langsung, melainkan melakukan pemungutan hasil bumi dari tiap daerah yang berguna untuk kepentingan berdagangnya. Untuk urusan pemerintah di tiap kabupaten, hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan bupati di wilayah masing-masing. Pemungutan hasil bumi tersebut diantaranya adalah indigo, lada, kopi, kayu dan juga kapas. Sistem penyerahan hasil bumi itu disebut dengan *Preanger-stelsel* atau Sistem Priangan. Berdasarkan traktat tahun 1677, Sultan Amangkurat II saat itu menyerahkan daerah Cisadane serta Citarum (Krawang) dan tahun 1705 diserahkan daerah Galuh, Sukapura serta Limbangan.

1.5.3 Historiografi yang Relevan

Peneliti telah menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Beberapa hasil penelitian relevan yang diambil oleh peneliti terdiri dari skripsi serta artikel jurnal.

Penelitian pertama yang relevan yakni artikel jurnal dengan judul “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)”. Artikel jurnal tersebut merupakan karya Muhajir Salam yang diterbitkan oleh Soekapoera Institute vol. 2, no. 1 pada tahun 2015. Hasil penelitian dalam artikel jurnal tersebut menjelaskan tentang perekonomian yang terjadi di Sukapura sebelum masuknya *kompeni*. Pertanian yang menjadi jantung ekonomi bagi rakyat dan padi adalah makanan pokoknya. Sejak zaman dulu tanah-tanah yang ada di kabupaten Sukapura merupakan tanah liar yang tidak dikuasai, hingga akhirnya lambat laun terjadinya perkembangan kepemilikan tanah bersamaan pada saat

meluasnya pertanian padi tegalan. Kehidupan ekonomi yang terjadi di Sukapura dipengaruhi oleh sistem sosial dalam masyarakat.

Usaha pembangunan ekonomi yang saat itu dilakukan di Sukapura pada tahun 1674 dimulai dengan tata kelola dalam pemerintahan, kemudian pada tahun 1677 terjadilah sistem monopoli serta kedatangan *kompeni*. Komoditas unggulan yang diterapkan dalam sistem monopoli tersebut yaitu kayu, kapas, benang, tarum, indigo serta lada. Pembahasan selanjutnya menjelaskan sistem eksploitasi ekonomi politik tahun 1800-1830 yang lebih buruk daripada *kompeni*, lalu pembahasan dari tahun 1870-1942 kabupaten Sukapura memasuki era liberal kolonial Belanda ditandai dengan munculnya UU Agraria pada tahun 1870.

Persamaan antara artikel jurnal karya Muhajir Salam dengan penelitian ini adalah di dalamnya menjelaskan mengenai keadaan sosial-politik yang terjadi di kabupaten Sukapura sebelum adanya *kompeni* dan saat adanya *kompeni* yang saat itu menerapkan sistem monopoli dan mengharuskan kabupaten Sukapura menyetorkan sebagian hasil bumi dan hasil pertaniannya, di dalamnya juga dibahas tentang mata pencaharian rakyatnya yaitu bertani padi huma serta hubungan yang terjalin antara rakyat, para ulama serta bupati di Sukapura. Metode penelitian yang digunakannya juga sama dengan penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah.

Perbedaan antara artikel jurnal karya Muhajir Salam dengan penelitian ini adalah dalam artikel jurnal tersebut pembahasan terkait kabupaten Sukapura dijelaskan secara meluas yang dimulai pada periode tahun 1674 sampai 2001, dimana pembahasannya terdiri dari beberapa bagian pada masa bupati yang

berbeda. Hal yang paling dominan dalam artikel jurnal tersebut adalah pembahasan Sukapura pada masa bupati ke 14, sedangkan dalam penelitian ini pembahasan yang paling dominan adalah pertanian dan kondisi yang terjadi di Sukapura pada masa bupati ke-3. Untuk periode waktunya juga berbeda, artikel jurnal tersebut lebih lama yaitu dari tahun 1674 sampai 2001 (meskipun pembahasan yang lebih rinci dari tahun 1908-2001), sedangkan penelitian ini dibatasi dari tahun 1674-1723.

Relevansi antara penelitian ini dengan artikel jurnal karya Muhajir Salam adalah untuk saling melengkapi data, sumber serta informasi mengenai pembahasan sejarah lokal kabupaten Sukapura yang kini sudah berubah nama menjadi Tasikmalaya, karena penelitian yang diangkat memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sejarah lokal pada masa awal VOC, mengingat terkait pencarian sumbernya juga masih minim dan sulit, karena kebanyakan menggunakan sumber buku Belanda. Oleh sebab itu, relevansi antara keduanya adalah untuk menambah informasi baru terkait sejarah lokal Sukapura yang periodenya sudah berlangsung lama.

Hasil penelitian yang relevan selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sukapura Pada Masa Pemerintahan Raden Ngabehi Wirawangsa Tahun 1632-1674”. Skripsi tersebut merupakan karya Agita Delia Setiani dari Universitas Siliwangi di Tasikmalaya yang terbit pada tahun 2021. Hasil penelitian dalam skripsi itu menjelaskan mengenai kesejahteraan sosial yang dirasakan masyarakat Sukapura pada masa kepemimpinan Raden Ngabehi Wirawangsa, karena Raden Wirawangsa saat itu

melakukan pengembangan SDA dengan cara memberlakukan penanaman pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Sukapura untuk mengembangkan keterampilan masyarakat saat itu yang mayoritasnya adalah para petani.

Kesejahteraan rakyat yang pada saat itu mengalami peningkatan berhasil membuat kabupaten Sukapura gemah ripah loh jinawi, Sukapura juga menjadi tata tengtrem kerta raharja karena menerapkan 4 prinsip, yaitu tata salira, nagara, buana, dan tata surya. Agita Delia Setiani dalam skripsinya menjelaskan pula tentang keberhasilan Raden Wirawangsa dalam membangun Sukapura menjadi daerah yang aman dan rukun serta menerapkan 3 ring dalam penataan lingkungan masyarakat Sukapura diantaranya nista, madya, serta utama.

Persamaan antara skripsi karya Agita Delia Setiani dengan penelitian ini sama-sama membahas sejarah lokal Sukapura dan menjelaskan tentang kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Sukapura yang disertai adanya keterlibatan dari bupati yang pada saat itu memerintah sehingga terjadinya perkembangan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Sukapura. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian sejarah.

Perbedaan antara skripsi karya Agita Delia Setiani dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus menganalisis kesejahteraan sosial masyarakat Sukapura pada masa pemerintahan bupati pertama Sukapura yaitu Raden Ngabehi Wirawangsa dan penanaman pertanian yang diberlakukan pada masa itu dominan hanya padi *huma* saja. Batasan tahun yang digunakan dalam penelitiannya juga

adalah tahun 1632-1674, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perkembangan pertanian yang terjadi pada masa pemerintahan bupati ketiga yaitu Raden Tumenggung Anggadipa, dimana tanaman pertanian yang ditanam sudah mulai beragam tidak hanya padi, karena pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa tahun 1677 mulai adanya VOC di Sukapura.

Relevansi antara penelitian ini dengan skripsi karya Agita Delia Setiani adalah untuk menambah referensi muatan lokal yang bisa digunakan dalam pembelajaran khususnya sejarah lokal dan bisa memberikan informasi bagi masyarakat Tasikmalaya agar mereka lebih mengetahui sejarah lokalnya sendiri. Hasil penelitian ini akan melengkapi skripsi karya Agita Delia Setiani yang di dalam pembahasan skripsinya berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat Sukapura pada masa pemerintahan bupati pertama yaitu Raden Wirawangsa, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada perkembangan pertanian yang akan berpengaruh terhadap masyarakat kabupaten Sukapura pada masa pemerintahan bupati ketiga yaitu Raden Tumenggung Anggadipa.

Hasil penelitian relevan lainnya adalah artikel jurnal karya A Syatori yang berjudul “*Preanger Stelsel; Kisah Tentang Bisnis Kopi Belanda di Tanah Cirebon-Priangan*”, yang diterbitkan oleh Tamaddun, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam vol. 8, no. 2 pada bulan Desember tahun 2020. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh VOC terhadap penyerahan hasil tanaman di wilayah Priangan (*Preanger-stelsel*). VOC yang pada saat itu melakukan berbagai strategi untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi di wilayah Priangan, salah satunya yaitu

Cirebon. Pada awalnya pihak *kompeni* berhasil menguasai elit kekuasaan dengan cara menjalin hubungan politik, kemudian mulai menanamkan kekuasaan serta pengaruhnya kepada para kelompok penguasa pribumi seperti bupati dan para bawahannya. Para bupati tersebut harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyetoran wajib. Pihak *kompeni* tidak akan ikut campur secara langsung dengan rakyat petani, akan tetapi pihak *kompeni* memanfaatkan sistem dominasi yang terjalin antara penguasa dengan bawahannya.

Para bupati beserta jaksa dan juga *ketib* merupakan atasan bagi kepala yang ada dilapisan lebih bawah, seperti kepala urusan distrik. Biasanya dalam distrik ada beberapa desa dengan kepalanya yang terdiri dari satu atau dua, untuk desa yang besar biasanya terdapat seorang *kuwu* atau *mantri* dan petinggi, sedangkan untuk pemukiman yang lebih kecil terdiri dari 6-10 keluarga terdapat seorang *lurah*. Strategi politik teritorial yang dibuat oleh VOC tersebut mampu mencapai dasar para masyarakat petani. Untuk bisa mengerahkan tenaga para petani yang banyak dan menguntungkan, maka diperlukan bantuan dari para kepalanya. Akhirnya pada tahun 1695 pemerintah tinggi pada saat itu memberikan perintah kepada para kepala untuk melakukan penyetoran barang-barang, dalam menjalankan sistem ekonominya VOC saat itu melakukan sistem penyerahan wajib dengan harga yang menguntungkan pihaknya (*verplichte leverantien*) dan penyerahan wajib pungutan tahunan (*contingenten*).

Adanya kewajiban pungutan serta kerja bagi para petani disebabkan oleh kewajiban penyerahan produksi padi yang diserahkan oleh petani kepada pemilik lahan yang diperintahkan oleh kepala distrik. Para pemuka agama juga memiliki

keterlibatan dalam urusan pertanian rakyat seperti pengaturan pekerjaan pertanian, waktu penyemaian serta pengelolaan pengairan. Untuk bisa meningkatkan penghasilannya dalam melakukan sistem monopoli, VOC juga melakukan penyewaan kabupaten dan desa kepada para pedagang Cina, kemudian VOC juga memberlakukan sistem tanam paksa kopi di wilayah Priangan, khususnya di Cirebon. Dibukanya lahan perkebunan kopi memberi keuntungan luar biasa bagi pihak *kompenni*, khususnya pada tahun 1713 Cirebon mampu menghasilkan 150 kg kopi. Adanya pembudidayaan kopi berdampak terhadap masyarakat pada saat itu.

Persamaan antara artikel jurnal karya A Syatori dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kehidupan masyarakat di wilayah Priangan pada masa VOC mulai dari abad ke 17 sampai 18 yang pada saat itu diterapkannya sistem monopoli penyerahan hasil tanaman komoditi utama. Dalam salah satu pembahasannya menggambarkan hubungan sosial yang terjalin diantara para petani dengan para kepalanya, adanya piranti sosial itu dimanfaatkan oleh pihak VOC agar bisa mencapai lapisan paling bawah yaitu rakyat. Selain itu, dijelaskan pula tentang penyerahan padi yang harus dilakukan oleh masyarakat di wilayah Priangan kepada VOC dan atasannya. Penyerahan hasil tanaman itu terdiri dari tarum, lada, indigo, padi, kayu dan lainnya yang diterapkan di wilayah Priangan, termasuk berlaku untuk daerah Cirebon dan kabupaten Sukapura. Metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian sejarah.

Perbedaan antara artikel jurnal karya A Syatori dengan penelitian ini adalah dalam jurnal tersebut penelitiannya berfokus pada wilayah Priangan dan Cirebon,

dimana daerah Cirebon saat itu tidak hanya melakukan penyerahan hasil tanaman padi saja tetapi kopi juga. Meskipun sebagian besar pembahasannya sama dengan penelitian ini, akan tetapi terdapat perbedaan dalam jurnal tersebut dibagian akhirnya lebih fokus membahas tentang pelaksanaan penanaman kopi dan juga dampaknya, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan teknis penanaman padi huma yang meliputi proses pelaksanaan, perkakas yang digunakan serta dampak positifnya. Untuk periode penelitiannya juga berbeda, jurnal tersebut dibatasi dari tahun 1681-1725, sedangkan penelitian ini dibatasi dari tahun 1674-1723.

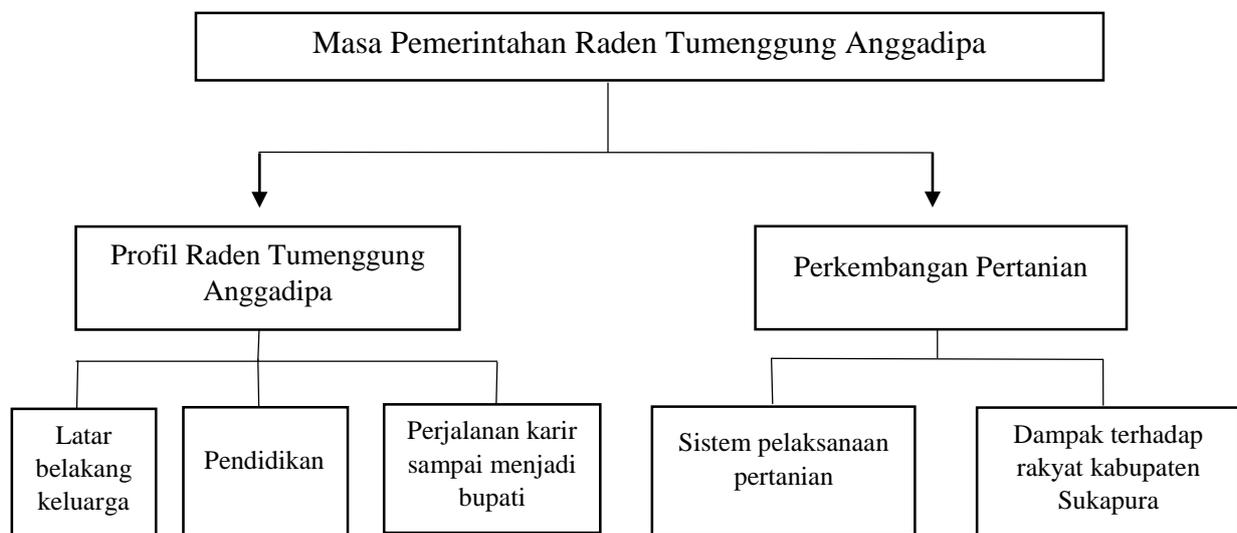
Relevansi antara penelitian ini dengan artikel jurnal karya A Syatori adalah untuk saling melengkapi data dan informasi terkait hubungan sosial dan ekonomi yang terjalin antara para rakyat, para kepala, dan VOC di wilayah Priangan pada abad ke 17 sampai 18, selain itu juga menambah informasi baru terkait perbedaan dan persamaan kebijakan yang diterapkan oleh VOC dalam pelaksanaan dan penyerahan hasil komoditi utama tanaman padi dengan perkebunan kopi yang pada saat itu menjadi primadona bagi bangsa Eropa. Sehingga relevansi antar keduanya memiliki keterkaitan pembahasan antara satu sama lain yang menambah dan melengkapi informasi baru bagi para pembacanya.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah hubungan diantara konsep yang satu dengan konsep yang lain serta berasal dari suatu permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini nantinya akan dibentuk dari berbagai pertanyaan penelitian yang memang sudah disusun,

tujuannya adalah untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan diawali dengan mendeskripsikan profil dari Raden Tumenggung Anggadipa yang meliputi latar belakang dari keluarganya, lalu membahas mengenai pendidikan yang pernah ia tempuh, serta menjelaskan perjalanan karir Raden Tumenggung Anggadipa sampai menjadi seorang bupati. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis perkembangan pertanian yang terjadi di kabupaten Sukapura pada tahun 1674-1723 yang meliputi sistem pelaksanaan pertaniannya serta yang terakhir akan menganalisis dampak dari perkembangan pertanian terhadap masyarakat kabupaten Sukapura.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

1.6 Metode Sejarah

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan yang dimulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi serta historiografi.³⁹

1.6.1 Pemilihan Topik

Peneliti mengacu terhadap pendapat dari Kuntowijoyo dalam proses pemilihan topik yang menjelaskan bahwasanya dalam menentukan sebuah topik dalam penelitian itu didasarkan pada kedekatan emosional serta kedekatan intelektual.⁴⁰ Kedekatan emosional menunjukkan adanya sebuah ketertarikan perasaan maupun emosi dari peneliti dalam hal menentukan serta memilih topik yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam kedekatan emosional antara peneliti dengan objek dalam penelitian ini terletak pada topik perkembangan pertanian pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di kabupaten Sukapura tahun 1674-1723, karena peneliti mempunyai ketertarikan dalam topik perkembangan pertanian tradisional.

Sektor pertanian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang mampu mendorong terciptanya kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat kabupaten Sukapura, mengingat pertanian zaman dulu masih menggunakan peralatan serta cara yang tradisional, akan tetapi bupati Sukapura pada saat itu mampu mengembangkan pertanian dengan peralatan serta cara yang masih terbatas, karena sejatinya perkembangan dalam bidang pertanian masa lalu

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hlm. 90.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 69.

terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dan hal tersebut manfaatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini.⁴¹ Kedekatan intelektual antara peneliti dengan objek dalam penelitian ini adalah terdapatnya beberapa referensi baik itu sumber primer ataupun sekunder yang berhasil didapatkan serta dijumpai oleh peneliti di dalam proses penelusuran sumber yang berguna untuk membantu serta menunjang dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.6.2 Heuristik

Heuristik merupakan tahapan mencari, menemukan, serta mengumpulkan berbagai sumber untuk mengetahui peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan penelitian. Heuristik juga merupakan sebuah teknik maupun cara agar bisa mendapatkan serta menemukan berbagai sumber yang bisa diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya studi pustaka, pengamatan di lapangan serta melalui sebuah wawancara.

Peneliti melakukan studi pustaka dan dokumen dengan mengunjungi Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura, disana peneliti memperoleh sumber berupa buku “Sajarah Babon Luluhur Sukapura”, lalu peneliti mengunjungi Perpustakaan Universitas Siliwangi dan memperoleh buku “Filsafat dan Teori Kepemimpinan”. Peneliti juga mengunjungi Perpustakaan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan memperoleh buku “Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia”. Kemudian peneliti mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

⁴¹ Muhajir Salam, “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001),” *HISTORIA, Soekapoera Institute* Vol. 2, No. 1 (2015): 106-201, hlm. 112.

Tasikmalaya, disana peneliti memperoleh buku “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Dari Masa Ke Masa”.

Peneliti melakukan pencarian sumber secara online di website Delpher.nl dan memperoleh buku bahasa Belanda yang berjudul “*Preanger: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Eerste Deel*”. Peneliti juga mendapatkan sumber buku yang berjudul “*Encyclopedie van Netherlandsh-Indie, Deerde Deel*” dari website universiteitleiden.nl dan melalui website ANRI, peneliti memperoleh arsip terkait daftar masa lalu mengenai desa, kepala desa, rumah tangga, upeti dan penghasilan di Priangan, Jawa Barat tahun 1686 yang di dalamnya terdapat data tentang kabupaten Sukapura.

Kuntowijoyo yang membagi sumber sejarah menjadi sumber primer serta sumber sekunder yang dilihat dari segi sifatnya.⁴² Sumber primer ini merupakan sebuah sumber sejarah yang secara langsung menunjuk pada objek sejarahnya atau dengan kata lain asalnya dari masa yang sama serta dari orang yang pertama menjadi saksi atau pelaku sejarah, sedangkan sumber sekunder merupakan sebuah sumber yang bisa didapatkan tidak semasa/sezaman dengan objek sejarah itu atau dengan kata lain asalnya bukan dari tangan yang pertama serta hasil penelitiannya juga sesuai dengan sumber primer serta sumber sekunder yang lain.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip mengenai daftar desa, kepala desa, rumah tangga, upeti dan penghasilan di Priangan, Jawa Barat tahun 1686 yang di dalamnya terdapat data kabupaten Sukapura. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. Wawancara ini

⁴² Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

biasanya dilakukan agar bisa mendapatkan sebuah informasi yang lebih dari para responden dengan mendasar pada sebuah laporan kepada pengetahuan serta keyakinan dari responden itu. Instrumen wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara. Peneliti melakukan sebuah wawancara kepada pihak Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura yang letaknya di Sukaraja. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di bawah ini:

1. Bapak Raden Atang Zakariya Sumantrapura Warasuda Santika yang merupakan Kasepuhan Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura.
2. Bapak Karim yang merupakan Perdik di lingkungan Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura.

Peneliti melakukan observasi ke Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura untuk menemukan data di lapangan dan melakukan penelitian secara langsung. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di wilayah sekitar Sukaraja yaitu Sawah Lega atau Sawah Dalem yang merupakan lahan pertanian bekas peninggalan Raden Tumenggung Anggadipa yang masih ada sampai saat ini. Di samping itu, peneliti juga observasi ke wilayah Sukaraja tempat pemakaman Raden Tumenggung Anggadipa.

Peneliti juga melakukan pengumpulan sumber dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara untuk bisa mendapatkan data dan informasi dari sumber tertulis, seperti buku, dokumen, arsip, jurnal, naskah dan sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sebuah buku serta artikel jurnal yang dijadikan sebagai pendukung di dalam penelitian ini agar bisa melengkapi berbagai fakta yang ada di lapangan.

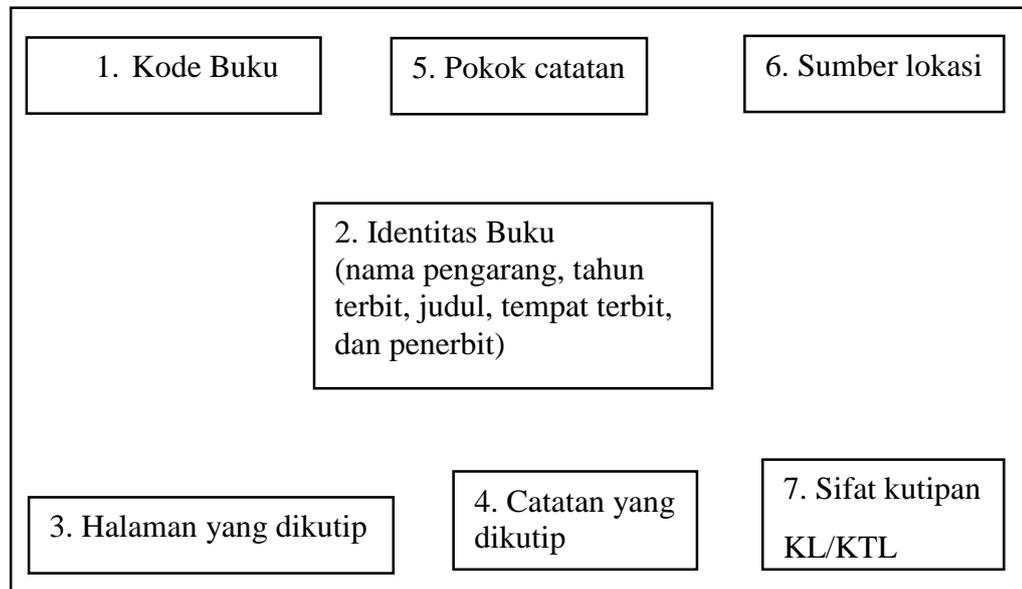
Sumber-sumber sekunder yang dianggap relevan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Buku karya Jan Breman dengan judul “Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870)” yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
2. Buku karya Mona Lohanda dengan judul “Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia” yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh Masup Jakarta.
3. Buku karya Raden Sulaeman Anggapradja yang berjudul “Sajarah Babon Luluhur Sukapura” yang diterbitkan pada tahun 1976 oleh Kumpulan Warga Sukapura.
4. Buku karya Sobana Hardjasaputra yang berjudul “Priangan Abad ke 17-19” yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh PT Galuh Nurani.
5. Disertasi karya Emuch Hermansoemantri yang berjudul “SAJARAH SUKAPURA (Sebuah Telaah Filologis)” yang diterbitkan pada tahun 1979 oleh Universitas Indonesia.
6. Buku Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berjudul “Sejarah Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari Masa ke Masa” yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Artikel jurnal karya Lasmiyati dengan judul “Kopi di Priangan Abad XVIII-XIX” yang terbit dalam Jurnal PATANJALA vol. 7, no. 2 tahun 2015.
8. Buku karya Nina Herlina Lubis dengan judul “Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942)” yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

9. Artikel jurnal karya Lilik Eka Suranny dengan judul “Alat Pertanian Tradisional sebagai Warisan Kekayaan Budaya Bangsa” yang terbit dalam Jurnal Arkeologi Papua vol. 1, no. 1 tahun 2014.
10. Artikel jurnal karya Muhajir Salam dengan judul “Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial (1908-2001)” yang terbit dalam Soekapora Institute vol. 1, no. 2 tahun 2013.
11. Buku karya PH Subroto dengan judul “Sistem Pertanian Tradisional Pada Masyarakat Jawa Tinjauan Secara Arkeologis dan Etnografis” yang diterbitkan pada tahun 1985 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
12. Buku karya Sartono Kartodirdjo dengan judul “Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium” yang diterbitkan pada tahun 1987 oleh PT Gramedia.

Data-data tersebut selanjutnya akan disimpan dengan menggunakan sistem kartu, untuk memuat berbagai pustaka serta kutipannya, baik itu kutipan langsung atau tidak langsung.⁴³ Sistem kartu dianggap lebih efektif untuk dipakai dalam penelitian ini, karena setiap data yang sudah didapatkan oleh peneliti akan dicatat ke dalam lembaran kartu dengan mencantumkan identitas dari buku atau sumber yang digunakan. Kartu yang digunakan untuk mencatat kutipan-kutipan biasanya berukuran 7,5 cm x 15 cm. Untuk format sistem kartunya yaitu sebagai berikut,

⁴³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Transito, 1994, hlm. 263.



Gambar 1.2 Sistem Kartu

Keterangan:

1. Kode Buku : untuk menyusun daftar pustaka berdasarkan abjad.
2. Identitas buku : Identitas dari buku yang akan dikutip
3. Halaman kutipan : untuk menulis nomor halaman yang akan dikutip
4. Catatan yang dikutip : untuk mencatat apa yang perlu dikutip
5. Pokok catatan : tempat untuk mencatat pokok catatan
6. Sumber lokasi : Lokasi buku yang nantinya akan dikutip
7. Sifat kutipan : Kutipan langsung (KL) / kutipan tidak langsung (KTL)

1.6.3 Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan sebuah tahapan dalam proses membandingkan berbagai sumber yang nantinya akan digunakan baik itu dari segi fisik sumber maupun dari isi sumber itu untuk digunakan sebagai bahan dalam penelitian. Sumber-sumber yang sudah ditemukan sebelumnya dalam tahapan heuristik,

selanjutnya harus diuji dengan tahapan dalam proses verifikasi ini yang terbagi menjadi dua tahap. Pertama kritik ekstern serta berikutnya adalah kritik intern.⁴⁴ Kritik ekstern biasanya dilakukan dengan sebuah tujuan untuk menguji keaslian maupun keabsahan dari sumber yang digunakan.

Tahapan kritik ekstern biasanya dilakukan proses melihat dari tahun penerbitan, bahan sumbernya, keterkaitan diantara penulis dengan objek dari sejarahnya serta gaya dari penulisan yang sesuai atau tidaknya dengan waktu dari terjadinya kejadian itu. Kemudian sesudah peneliti ini benar-benar merasa yakin bahwasanya sumber itu valid dan juga asli, maka untuk langkah selanjutnya peneliti akan melakukan proses kritik intern. Proses dalam tahapan kritik intern biasanya digunakan untuk menguji seberapa akurat mengenai informasi yang didapat dan disampaikan oleh sumber sejarah.

Proses ini biasanya dilakukan melalui sebuah tahapan perbandingan dengan sumber yang lain, peneliti juga harus bisa melakukan serta memberikan sebuah evaluasi persamaan, perbedaan, serta kesalahan sebuah informasi dari berbagai sumber, kemudian apabila kita sudah bisa menentukan bahwasanya dokumen tersebut memang otentik, maka peneliti juga harus melakukan penelitian agar dokumen itu bisa dipercaya.⁴⁵

Kritik intern yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melihat keseluruhan isi dari berbagai sumber dan juga dokumen yang sudah didapat dari Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura dan juga hasil dari pencarian secara *online*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 100.

⁴⁵ Nina Herlina Lubis, *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020, hlm. 57.

melalui website resmi seperti ANRI, Delpher, dan KITLV. Dari berbagai sumber seperti arsip, data, buku dan artikel jurnal yang sudah dikumpulkan, peneliti selalu mencari data-data penguat lainnya yang bisa menambah informasi untuk penelitian ini. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip terkait daftar masa lalu mengenai desa, kepala desa, rumah tangga, upeti dan penghasilan di Priangan, Jawa Barat tahun 1686 karena di dalamnya memuat data kabupaten Sukapura. Peneliti juga berusaha sebisa mungkin mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penguat lainnya yaitu sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal serta piagam pengangkatan Raden Tumenggung Anggadipa sebagai bupati ke-3 Sukapura

Peneliti dalam kritik intern nantinya akan menyesuaikan hasil wawancara dengan berbagai temuan yang sudah didapatkan baik itu data, arsip, dokumen, artikel jurnal maupun buku. Hasil wawancara yang sudah dilakukan nantinya akan dibandingkan dengan sumber tertulis yang sudah peneliti peroleh, maka akan terdapat informasi yang sesuai dan juga informasi yang tidak sesuai, apabila peneliti menemukan informasi yang berbeda nantinya peneliti akan mengambil sumber berdasarkan tahapan kritik ekstern.

Kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melanjutkan tahapan memilih dokumen, arsip, data, dan buku yang sudah ditemukan lalu akan dilakukan pengujian keasliannya yang dimulai dengan mengkaji waktu, tempat, dan pembuat dokumen tersebut. Beberapa sumber ada yang masih dalam bentuk asli (*hardfile*) dan ada juga yang didigitalisasi (*softfile*). Untuk sumber *hardfile* bisa diidentifikasi secara langsung oleh peneliti dengan mudah seperti naskah

piagam pengangkatan Raden Tumenggung Anggadipa, buku dan artikel jurnal sehingga peneliti mudah dalam memahami isi konten dan identitas tulisan dalam sumber-sumber tersebut. Sedangkan untuk arsip yang dikeluarkan oleh ANRI dan sumber-sumber lainnya, peneliti akses secara *daring* dalam bentuk *softfile* di website resmi seperti ANRI, Delpher, dan KITLV sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan sumber yang digunakan karena direkayasa secara digital. Berbagai data dan informasi yang didapat dari sumber sekunder lalu dianalisis sesuai fakta, data, dan juga hasil wawancara sehingga mampu memberikan sebuah informasi yang valid. Melalui tahap ini peneliti bisa mempercayai keaslian serta kredibilitas dari berbagai sumber yang sudah ditemukan dan digunakan.

Sumber yang sudah jelas keaslian dan kredibilitasnya kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan penelitian mengenai perkembangan pertanian pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di kabupaten Sukapura tahun 1674-1723. Dalam tahapan ini peneliti akan fokus terhadap sumber data, buku maupun dokumen yang sesuai dengan fakta dan juga data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam sebuah penulisan.

1.6.4 Interpretasi

Interpretasi ini merupakan sebuah tahap yang biasanya digunakan oleh peneliti untuk menafsirkan berbagai fakta yang sudah didapat dari hasil analisis serta bacaan dari berbagai sumbernya, kemudian nantinya akan digabungkan dengan sebuah fakta agar disusun berdasarkan analisis yang benar serta menjadi sebuah rangkaian dari berbagai fakta yang logis dan faktual mengenai sebuah

peristiwa yang diangkatnya. Interpretasi haruslah bersifat deskriptif agar penafsirannya dapat bersifat objektif serta terhindar dari subjektivitas penulis.

Peneliti melakukan proses interpretasi data dengan cara melakukan perbandingan data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber baik itu dari dokumen, buku, artikel jurnal, observasi lapangan maupun hasil dari wawancara, setelah didapatkan informasi serta data yang sama, maka selanjutnya data-data tersebut akan disusun secara terstruktur.

Peneliti dalam hal ini mencoba untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi dari berbagai sumber bahwa Raden Tumenggung Anggadipa adalah bupati ke-3 Sukapura yang memimpin dari tahun 1674-1723, beliau terkenal sebagai sosok yang religius, mempunyai kekayaan dan putra-putri yang banyak sehingga populer dengan sebutan *Dalem Sawidak* dikalangan para rakyatnya. Beliau adalah sosok bupati yang dicintai oleh rakyatnya, karena kepedulian dan perhatiannya yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat kabupaten Sukapura, maka saat itu beliau membagi kewenangan kepada 4 putranya, diantaranya adalah patih Anggadipa II (*Dalem Abdul*) yang bertugas dalam bidang pertanian serta pembuatan saluran irigasi.

Dibukanya lahan-lahan pertanian dan dibuatnya pengairan bertujuan untuk memudahkan para rakyat melakukan kegiatan bertani dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Proses pelaksanaan pertanian dimulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pengolahan hasil pertanian, sedangkan untuk peralatan yang digunakan masih sangat tradisional seperti cangkul, ani-ani, tongkat tunggal, sabit, cengkrong dan yang lainnya. Memasuki tahun 1677 pada

era *kompni*, kabupaten Sukapura diwajibkan untuk menyerahkan hasil tanaman pertanian kepada VOC. Perkembangan pertanian yang terjadi di kabupaten Sukapura berdampak terhadap kehidupan rakyat, seperti terciptanya budaya gotong-royong dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan terwujudnya kesejahteraan hidup bagi rakyat kabupaten Sukapura.

1.6.5 Historiografi

Tahap yang terakhir dalam sebuah metode sejarah ialah historiografi. Pada tahap ini seorang peneliti harus melakukan sebuah proses pemaparan serta menyusun hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk penulisan yang kronologis. Menurut pendapat dari Kuntowijoyo, penyajian dalam tulisan sejarah itu terdiri dari tiga bagian (pengantar, hasil penelitian, serta simpulan).⁴⁶ Selain itu, dalam menyusun suatu hasil penelitian harus juga didukung oleh berbagai sumber serta data yang sudah disesuaikan melalui tahapan dalam metode sebelumnya dengan cara yaitu memperhatikan mulai dari pengantar diantaranya yakni latar belakang, lalu hasil dari penelitian yang terdiri dari pemaparan serta kesimpulan yang isinya sebuah ringkasan. Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan penyusunan sesuai dengan fakta yang sudah diperoleh, kemudian akan disusun secara sistematis dan terstruktur.

Peneliti menggunakan ilmu bantu lain seperti ilmu sosiologis dan ilmu pertanian untuk mendeskripsikan dan membantu merekonstruksi sejarah secara komprehensif. Peneliti juga berusaha membuat tulisan yang baik semaksimal mungkin agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diharapkan bisa

⁴⁶ Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 105.

memberikan informasi mengenai Perkembangan Pertanian Pada Masa Pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di Kabupaten Sukapura Tahun 1674-1723.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan peneliti gunakan terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai keterkaitan satu sama lain serta akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan. Penelitian yang berjudul “Perkembangan Pertanian Pada Masa Pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa di Kabupaten Sukapura Tahun 1674-1723” terdiri dari beberapa bagian.

Bab I adalah pendahuluan, di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, tinjauan teoretis, metode sejarah, serta sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai profil dari Raden Tumenggung Anggadipa. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari bupati ke-3 Sukapura yaitu Raden Tumenggung Anggadipa. Kemudian menjelaskan mengenai pendidikan yang pernah beliau tempuh, hingga membahas mengenai perjalanan karir beliau sampai menjadi seorang bupati. Selain itu, membahas pula mengenai para putranya yang mendapat tugas untuk membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan dari semasa kecil bupati Raden Tumenggung Anggadipa sampai beliau tumbuh menjadi seorang bupati yang sangat dicintai dan juga disegani oleh para rakyatnya sehingga beliau menjadi sosok yang mempunyai tempat tersendiri dihati para rakyatnya. Beliau yang sedari kecil menimba ilmu agama bersama Syekh Abdul Muhyi, maka saat

memimpin pun beliau banyak menyiarkan agama islam di bumi Sukapura. Sehingga keadaan negara saat itu sangat tenteram. Maka dari itu, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai profil dari bupati ketiga Sukapura yaitu Raden Tumenggung Anggadipa.

Bab III menjelaskan perkembangan pertanian yang terjadi di kabupaten Sukapura pada tahun 1674-1723. Peneliti akan menganalisis dan menguraikan proses dalam pelaksanaan sistem pertanian tradisional pada masa itu yang meliputi ketentuan yang diterapkan, proses pengolahan tanahnya, peralatan pertanian yang digunakan, pertanian yang berkembang terjadi di daerah mana saja, jenis-jenis tanaman yang ditanam serta komoditi utama di Sukapura.

Bab IV menganalisis dampak dari perkembangan pertanian terhadap rakyat kabupaten Sukapura saat itu. Perkembangan pertanian yang terjadi pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Anggadipa yang terwujud dengan banyak dibangunnya saluran irigasi serta areal pesawahan di beberapa daerah Sukapura tentunya berdampak terhadap kehidupan rakyat Sukapura dan terciptanya budaya gotong-royong yang terjalin dalam kehidupan rakyat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terwujudnya kesejahteraan rakyat, karena mayoritas rakyat Sukapura pada masa itu bermata pencaharian utama sebagai petani. Peneliti dalam bab ini akan menganalisis dampak dari perkembangan pertanian terhadap kesejahteraan rakyat kabupaten Sukapura pada tahun 1674-1723.

Bab V merupakan penutup, dalam bab terakhir ini peneliti akan memaparkan tentang simpulan dari semua hasil penelitian, sedangkan bagian saran akan menjelaskan mengenai saran terhadap kepentingan praktis.